

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung; Alfabeta,2008)
- Basah Sjachran, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara; (Surabaya; Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1995)
- Djinjang Moh. Saleh, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta; Balai Buku Ichitiar, 1985)
- E.Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta; Ichitiar, 1957)
- Hadjon Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia(Surabaya; Yuridika, 2002)
- HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ilmar Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta; PrenadaMedia,2013)
- Juiarso dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik; (Bandung; Nuansa, 2012)
- Kansil Cst, Kamus Istilah Hukum (Jakarta; Gramedia PustakaUtama,2009)
- Muhammad Adiguna Bimasakti dan Heru Susetyo, Aspek-Aspek Hukum Dalam Pelayanan Publik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja;(Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2021)
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum (Yogyakarta; Liberty, 1999)
Pudyatmoko Sri, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan (Jakarta; Grafindo, 2009)
- Radbruch Gustav, Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Jakarta; UKI Press, 2006)
- Rusli Budiman, Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif (Bandung; Hakim Publishing, 2013)
- Sutedi Adrian, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik(Jakarta; Sinar Grafika, 2017)
- Sutedi Adrian, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik(Jakarta; Sinar Grafika, 2010)
- Soehino, Asas-asas Tata Pemerintah (Yogyakarta; Liberty, 1984) Tjandra

Riawan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta; Sinar Grafika, 2018)

Winarno Budi, Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Edisi Revisi), (Yogyakarta; Media Pressindo, 2007)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Tentang Perubahan Kedua Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan di Daerah.

Jurnal

Ahmad Ahmad, Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum Replik, 2017

Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan, hal.1 dikutip pada skripsi M. Panca Kurniawan. 2016. Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (Bpmp) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata. Universitas Lampung (<http://digilib.unila.ac.id/>)

Budiamin Rodding, Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Tanjung Pura Law Review, 2017.

Bridget Hutter, The Attraction of Risk Based Regulation : accounting for emergence of risk ideas in regulation, London: Centre for Analysis

of Risk and Regulation, 2015.

Erman Rajagukguk, Harmonization of Law in ASEAN Countries towards Economic Integration; Jurnal Hukum Internasional, Indonesian Journal of International Law, Vol. 9, No. 4, 2012.

Evy Urmilasari, Andi M. Rusli, A. Lukman Irwan, Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6, Nomor 1, Januari, 2013

Herman N. Suparman, Implementasi OSS RBA di Daerah Tantangan dan Kebutuhan Pemda; KPPOD, Jakarta, 2021

Helmi, Sistem Pelaksanaan Perizinan di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 9 No.1. Januari 2015

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)

Ni Komang Ayu Arniti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Analogi Hukum, 2019.

Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2018.

Robert Baldwin dan Julia Black, *"Reality Responsive Regulation"*, *Modern Law Review* 71, 2014.